

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JUNI 2011

Minggu I Juni 2011 ini DPR tetap berkonsentrasi pada tugasnya dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Berikut ringkasan untuk minggu ini.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

Legislasi

Kegiatan Dewan dalam bidang legislasi. Atas dasar rekapitulasi RUU luncuran tahun 2010, ada 21 RUU yang diharapkan selesai. Lima diantaranya sudah selesai disetujui menjadi UU, terakhir adalah RUU tentang Mata Uang. Adapun 16 RUU diharapkan dapat diselesaikan dalam masa persidangan ini, atau sekurang-kurangnya pada masa persidangan yang akan datang, terdiri dari beberapa RUU dari DPR dan dari Pemerintah yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I.

Pada Rapat Paripurna tanggal 31 Mei 2011, Dewan telah memberikan persetujuan atas usul inisiatif Badan legislasi terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial, disetujui menjadi RUU inisiatif DPR yang akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme Dewan. Adapun dasar pertimbangannya: bahwa NKRI harus melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi setiap warganegara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai dan sejahtera lahir dan bathin; bahwa benturan antar kelompok masyarakat, suku, etnis dan agama, dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan dalam mencapai tujuan NKRI; bahwa ketentuan hukum mengenai penanganan konflik masih bersifat parsial dan reaktif yang tersebar di berbagai peraturan dan UU, belum bersifat komprehensif.

UU yang ada masih bersifat sektoral, implementasinya dari masing-masing departemen dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, diperlukan aturan-aturan yang menetapkan secara jelas mengenai tindakan secara jelas dan tahapan penanganan konflik dalam



upaya pencegahan maupun penanganan pada saat dan sesudah konflik.

Anggaran

Dalam Buletin minggu yang lalu telah disampaikan ringkasan Keterangan Pemerintah tentang Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012. Pada tanggal 25 Mei 2011, semua fraksi DPR telah menyampaikan pandangan atas keterangan Pemerintah. Pada intinya, semua fraksi bersepakat untuk dapat melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme dan tata tertib.

Fraksi Partai Demokrat mengharapkan capaian pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, terukur, dan berkeadilan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pembukaan lapangan kerja baru dan penurunan tingkat kemiskinan.

Fraksi Golkar memberikan beberapa catatan antara lain mengharapkan: [a] Target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu minimal 7%; [b] Angka inflasi dibawah 5%; [c] Nilai tukar rupiah terhadap USD dipertahankan pada angka Rp 9.000/ dollar AS ; [d] Suku Bunga SPN dapat diturunkan dibawah 6% agar investasi sektor riil terus berkembang; [e]. dan mempertahankan lifting minyak sebesar 970 ribu barel perhari. [f] Arah kebijakan fiskal yang berorientasi kesejahteraan harus mampu terus menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Fraksi PDI-Perjuangan meminta perhatian terhadap relatif rendahnya perkiraan angka inflasi tahun 2012 yang

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Helmizar **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

berada pada kisaran 3,5–5,5% tidak boleh dipandang sebagai hal yang luar biasa karena inflasi tahun 2010 tercatat cukup tinggi yakni hampir 7,0%, artinya tekanan harga pada masyarakat telah terjadi sejak dua tahun sebelumnya. Jika pemerintah benar-benar berniat mengurangi beban kenaikan harga, maka perlu digiatkan usaha menghambat kenaikan harga terutama bahan-bahan pokok. Apalagi ada potensi perubahan cuaca pada tahun 2012 yang diperkirakan dapat mengganggu produksi sehingga berakibat naiknya harga pangan dunia.

Fraksi PAN DPR-RI berpandangan bahwa secara umum paradigma yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan RAPBN tahun 2012 adalah kebijakan untuk lebih menjaga dan berada pada kerangka konsolidasi fiskal, sehingga ruang ekspansi sangat terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengembangan pendidikan, infrastruktur, dan pengeluaran produktif lainnya. Sepertinya pemerintah belum memiliki ruang gerak yang cukup karena terkendala oleh struktur RAPBN itu sendiri.

Fraksi PKS memandang bahwa pertumbuhan ekonomi kedepan perlu mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan (*growth with equality*), mengikutsertakan sebanyak mungkin rakyat (*inclusive growth*), pro-kelestarian lingkungan (*green growth*) serta memberdayakan potensi ekonomi domestic secara optimal. Ancaman terhadap inflasi di tahun 2012 masih akan besar sehingga pemerintah harus bekerja keras dan melakukan upaya antisipasi dini. Fraksi PKS meminta pemerintah untuk secara serius dan tegas melakukan *extra effort* dalam rangka menghapus mafia perpajakan, meningkatkan *tax compliance* khususnya wajib pajak KPP *large tax office* KPP Khusus, serta menurunkan tingkat *tax evasion* khususnya perusahaan asing melalui upaya *transfer pricing*. Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan belanja negara 2012 yang difokuskan pada upaya akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial melalui strategi empat jalur yaitu *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*.

Fraksi PPP menilai selama ini sasaran makro ekonomi yang ditetapkan pemerintah sangat optimistis, namun kemampuan daya dukung makro ekonomi yang dicapai terhadap perbaikan sektor riil belum optimal. Untuk itu, Fraksi PPP meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terjadinya diskoneksi tersebut, mengapa kondisi makro ekonomi kita yang membaik belum sepenuhnya membangkitkan kondisi sektor riil, dan pada sisi lain mengapa sektor riil belum sepenuhnya mampu memanfaatkan perbaikan kondisi makro ekonomi tersebut.

Fraksi PKB mendorong untuk pelaksanaan APBN tahun 2012 idealnya dijalankan dengan tidak hanya untuk mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) semata, tapi juga memperhatikan strategi pembangunan ekonomi lainnya, yaitu *pro jobs*, *pro poor*, dan *pro environment* sehingga percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini juga

disertai perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*), dengan indikator kesempatan kerja semakin banyak tersedia serta kemiskinan di Indonesia semakin berkurang.

Fraksi Partai Gerindra dengan niatan tulus membangun bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, siap membahas kerangka ekonomi makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2012 yang diajukan pemerintah pada tingkat pembahasan berikutnya. Namun, tanpa bermaksud menisbikan apalagi menetralkan apresiasi yang telah kami sampaikan, asumsi-asumsi ekonomi makro yang disampaikan pemerintah tidak berdampak secara langsung kepada kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan pembangunan nasional. Hal ini bukan merupakan kesalahan atau kekurangan pemerintah, tetapi ini kekurangan kita dan kita harus bertanggungjawab dengan memperbaikinya.

Fraksi Partai Hanura berpendapat, berbagai perkembangan positif perekonomian global dan regional seharusnya dijadikan momentum untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun sejumlah indikator makro ekonomi tahun 2012, seperti nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ekspektasi dan perencanaan di awal tahun, namun pencapaian tersebut semestinya masih dapat dioptimalkan.

Pengawasan

Dalam Rapat Paripurna tanggal 31 Mei, Ketua BPK-RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 kepada DPR. Dalam laporan atas LKPP tahun 2010 tersebut, BPK memberikan **opini wajar dengan pengecualian** atau sama dengan opini yang diberikan BPK-RI atas LKPP tahun 2009. Opini LKPP ini sejalan dengan Laporan Keuangan Bendahara Umum (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Namun demikian, BPK menyampaikan bahwa ada 4 permasalahan yang ditemukan dalam LKPP 2010 yang menjadi pengecualian atas



Rapat Paripurna tanggal 31 Mei, Ketua BPK-RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 kepada DPR yang diterima oleh wakil ketua Anis Matta

kewajaran LKPP. Yaitu: permasalahan penagihan, pengakuan, dan pencatatan penerimaan perpajakan; pencatatan uang muka BUN tidak memadai; permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan piutang pajak; permasalahan dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap.

BPK juga menemukan permasalahan signifikan lain terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan terkait pengendalian intern antara lain pelaksanaan monitoring dan penagihan atas kewajiban PPh Migas tidak optimal. Untuk itu, pemerintah diminta memperbaiki mekanisme penagihan, dan menagih kekurangan PPh Migas, mengupayakan amandemen atas klausul PSC yang belum memperhatikan penerapan tax treaty.

Permasalahan lainnya yaitu penerimaan hibah langsung oleh K/L masih dikelola diluar mekanisme APBN. Untuk itu, BPK meminta Pemerintah menertibkan administrasi hibah agar penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LKPP dapat diyakini kelengkapan dan keakuratannya. Laporan hasil pemeriksaan BPK akan ditindaklanjuti oleh Komisi Dewan dan BAKN DPR-RI.

Diplomasi Parlemen

The 7th Global Forum of Global Parliamentarians on Habitat. Pada 16-21 Mei 2011 DPR RI telah mengirimkan delegasi untuk mengikuti the 7th Global Forum of Global Parliamentarians on Habitat (GPH) di Zadar, Kroasia. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Ferrari Roemawi, MBA (F-PD). Tema GPH tahun ini yaitu “Good Laws for a Better Habitat” dan workshop dengan topik “Legislators as Drivers of Change” dan “Climate Change and Coastal Cities”.

G20 Speaker’s Consultation 2011. Ketua DPR RI, Dr. H. Marzuki Alie, bersama Ketua BKSAP DPR RI yaitu Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA. dan Ir. H. Azam Azman Natawijana telah menghadiri G-20 Speaker’s Consultation 2011 pada

18-20 Mei di Seoul – Korea Selatan. Sidang ini merupakan forum Ketua Parlemen Negara-negara G-20 yang kali ini mengangkat tema “Development and Growth for Common Prosperity”. Pada Sidang kali ini, Ketua DPR RI telah menyampaikan presentasi dengan judul “Strategy for Inter-Parliamentary Collaboration for World Peace and Anti-Terrorism”. Pada sesi ini Ketua DPR RI menegaskan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan tindakan kekerasan seperti terorisme, justru sebaliknya Islam mengajarkan perdamaian dan anti-kekerasan. Presentasi ini diharapkan dapat semakin melunturkan stigma negatif terhadap Islam yang berkembang secara luas satu dekade terakhir ini. G-20 Speaker’s Consultation kali ini menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Joint Communiqué*.

Working Group Meeting IPU Asia-Pacific Group. Saat ini DPR RI menjabat sebagai Ketua Kelompok Geopolitis Asia-Pasifik (APG) *Inter-Parliamentary Union (IPU)* yang terdiri dari 29 negara di wilayah Asia-Pasifik. Kelompok geopolitis di IPU berfungsi untuk memberi masukan terhadap program-program atau resolusi-resolusi IPU, serta menentukan masukan keanggotaan dari negara-negara Asia-Pasifik pada berbagai badan atau komisi di IPU. Terkait keketuaan tersebut, pada tanggal 14 Juli 2011 DPR RI akan menjadi tuan rumah APG Working Group Meeting di Gedung DPR RI. Pertemuan satu hari ini akan mengundang 8 (delapan) negara lain, yang terdiri dari perwakilan negara-negara Asia-Pasifik yang duduk di Komite Eksekutif IPU yaitu Korea Selatan, Vietnam, Kamboja, dan Kanada; dua negara Ketua APG sebelum Indonesia, yaitu China dan India; serta dua negara Ketua APG yang akan datang, yaitu Iran dan Jepang. Pertemuan APG Working Group akan dibuka oleh Ketua DPR RI, Dr. H. Marzuki Alie, sebagai Ketua APG dan selanjutnya akan dipimpin oleh Dr. Nurhayati Ali assegaf, M.Si., sebagai Anggota Komite Eksekutif IPU dan President *IPU Women Coordinating Committee*. Pertemuan working group kali ini akan membahas mengenai masukan APG terhadap IPU Strategic Plan 2012-2017 dan menentukan arah ke depan APG agar dapat lebih solid dan berkontribusi positif terhadap kemajuan IPU di masa yang akan datang.*



Seputar Hari Kelahiran Pancasila

Pancasila Kuat Hadapi Ujian dan Cobaan

Perjalanan panjang bangsa Indonesia telah menjadi bukti betapa kuatnya Pancasila menghadapi ujian dan cobaan.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI DR.H.Marzuki Alie, dalam pidato tanpa teksnya yang mengebu dan penuh semangat di hadapan masyarakat Bali saat acara peluncuran buku terbesar kelahiran Pancasila, Denpasar (1/5).

Marzuki yang datang sebagai Ketua DPR RI atas undangan resmi yayasan Bung Karno, Dalam pidatonya selama 25 menit, menjelaskan bahwa semasa orde baru, Pancasila adalah suatu alat legitimasi, tetapi setelah reformasi pancasila justru terlihat mulai terpinggirkan, “dimasa reformasi ini Pancasila seolah hanya berada di dalam Preamble, banyak sekali kejadian saat ini dimana sudah tidak ada lagi rasa saling menghargai sesama anak bangsa”. ujarnya. Untuk itu, nilai nilai luhur Pancasila harus segera direvitalisasi kembali, dan kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada pengurus yayasan Bung Karno atas adanya ide peluncuran buku terbesar ini, lanjutnya di hadapan ribuan masyarakat Bali.

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, pada kesempatan yang sama menguraikan bahwa Bung Karno sebagai pencetus Lima Sila selalu mengajarkan kita harus saling menghargai agar tidak terjadi keretakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”Kita juga harus mewaspadaai setiap tindakan yang ingin mengingkari Pancasila”. Katanya.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur, Ketua DPRD Bali, AA Oka Ratmadi, SH yang juga menjabat sebagai Penasehat dalam



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat acara peluncuran buku terbesar kelahiran Pancasila



Yayasan Bung Karno, menyatakan bahwa tidak menjadi soal mana yang lebih dulu mencetuskan ide peluncuran buku, yang penting adalah kita harus saling menghormati,”tidak menjadi persoalan besar bagi masyarakat Bali, karena dalam naskah Kuno Bali

yang tertulis di daun lontar, Pancasila sudah ada dan sudah menjadi bagian penting dari budaya Bali, ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gus Marhaen seorang tokoh muda Bali yang memiliki hubungan erat dengan tokoh politik nasional, tokoh masyarakat



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat foto bersama Gubernur Bali dan pengurus yayasan Bung Karno



kat Bali, dan menjabat sebagai Ketua yayasan Bung Karno, menguraikan tujuan peluncuran buku tersebut adalah untuk mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya Pancasila bagi sebuah Dasar Negara, "Pancasila adalah satu satunya dasar negara di Indonesia, kami sebenarnya memiliki ide sejak lama untuk menerbitkan buku ini, harusnya sejak tahun 2010 buku ini sudah kami terbitkan, tetapi karena kami lakukan penyempurnaan maka, baru dapat kami luncurkan sekarang, bertepatan dengan tanggal 1 Juni, dimana semua anak bangsa merayakan hari kelahiran Pancasila', ujanya bersemangat.

Ketika diwawancara dalam dua tempat berbeda, Gus melanjutkan,

isi dan manfaat buku yang diluncurkan sudah sangat besar," Baik isi bentuk, maupun manfaatnya, buku ini sudah sangat besar, buku ini menyangkut semua aspek sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak dapat disangkal lagi karena Pancasila adalah wajib hukumnya bagi siapapun juga, Urainya. Ketika diminta tanggapannya tentang P4 dan BP 7 semasa Orba, Gus dengan tangkas dan lugas menjawab bahwa dua hal tersebut adalah hal yang sangat penting dalam upaya kita melestarikan dan mengamalkan Pancasila, "Semua itu memang sangat diperlukan, dua hal itu sekarang menghilang karena oknum yang payah, seharusnya sistem jalan, rezim tetap rezim, katanya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Gus, Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi yang diwawancara empat mata di ruang VIP 2 bandara Ngurah Rai, Bali, mengungkapkan bahwa kondisi saat ini tentang pengamalan nilai nilai luhur pancasila, sangat parah dan sangat mengesankan. "Pancasila kalah dengan hiruk pikuknya sepakbola, kami sangat mensupport kegiatan ini karena saat ini kami melihat pendidikan Pancasila sudah sangat terabaikan," Padahal Pancasila adalah dasar bagi pembentukan karakter, wajib hukumnya terhadap upaya pelajaran pancasila yang perlu ditingkatkan, Suwandhi menambahkan, "ini merupakan momentum bagi masyarakat Bali, pembelajaran yang sangat berharga.

Mewakili kalangan TNI / POLRI yang hadir dalam acara tersebut, Pangdam Udayana Mayor Jenderal TNI Leonard, menyatakan dalam pidatonya bahwa TNI sangat mendukung terbitnya buku tersebut, "TNI bangga, atas peluncuran buku ini, TNI melihat bahwa kondisi saat ini Pancasila sudah mengalami degradasi dalam masyarakat, kami siap membantu setiap kegiatan dalam upaya mensosialisasikan Pancasila, agar Pancasila tidak sekedar menjadi simbol belaka.

Hasil pengamatan di lapangan, masyarakat Bali terlihat begitu antusias dengan adanya peluncuran buku tersebut, ribuan orang berdatangan ke lapangan Makorem 163 Wirasatya. "Masyarakat Bali sangat menjaga Pancasila kami hidup rukun dan damai walaupun ada perbedaan diantara kami, demikian tanggapan seorang warga ketika ditanya perihal kehidupan berpancasila dalam lingkungan warga Bali.

Acara peluncuran buku yang berlangsung selama hampir 2 jam, dan dimulai dengan penampilan apik mahasiswa/I dalam mementaskan tari Mahendrata, menciptakan suasana berbeda yang mengiringi peluncuran buku dengan ukuran 6x3 M.

Tigajam sebelum kedatangan Ketua DPR RI, Bandara Ngurah Rai mendapat ancaman Bom melalui SMS, sehingga membuat Polda Bali menurunkan Tim Gegana guna menyisir Bandara (Djst) foto: doc parole

Paripurna DPR Setujui RUU Mata Uang

Setelah sempat deadlock pada DPR periode lalu, DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang dalam pengambilan keputusan tingkat II menjadi UU.



wakil ketua komisi XI Achsanul Qosasih saat memberikan Draf RUU mata uang yang telah disahkan oleh DPR kepada wakil Ketua Anis Matta (atas)



bedaan tersebut hingga tercapai kesepakatan bahwa Rupiah kertas yang ditandatangani pemerintah dan BI berlaku dan diedarkan mulai tanggal 17 agustus 2014 sedangkan redenominasi diatur dalam UU sendiri,"terangnya kepada sidang Paripurna.

Mengenai kordinasi pemerintah dengan BI dengan tahapan saebagai berikut perencanaan, percetakan, pengeluaran, peredaran, pencabutan, maupun pemusnahan. "Sebagai sistem penguatan check and balances perlu kordinasi pengelolaan rupiah. tahap perencanaan rupiah dilakukan oleh BI dengan berkordinasi dengan pemerintah,"ujarnya.

Dia menambahkan, keikutsertaan pemerintah dalam mata uang Rupiah dan kertas pada tahun 2014 sejalan dengan pernyataan bahwa mata uang

“RUU Mata uang usulan DPR, periode 2004-2009 pernah dibicarakan didalam Pansus karena ketidaksepakatan DPR dengan pemerintah. Berdasarkan keputusan Rapat Bamus 8 april 2010, RUU tersebut kemudian diajukan kembali dan sudah dirampungkan pada pembahasan tingkat I,”kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasih, di Gedung Nusantara II, Selasa, (31/5).

Menurutnya, RUU ini merupakan RUU inisiatif DPR, sementara latar belakang pembentukan RUU ini sebagai

upaya DPR dan pemerintah dalam mengatur mata uang sejalan dengan Amandemen UUD1945.

Dia menambahkan, sebelumnya terdapat dua materi pokok yang masih diperdebatkan saat itu, yaitu masalah waktu penandatanganan Rupiah antara pemerintah dan BI, perubahan harga rupiah (redenominasi).

“Khusus persoalan perubahan mata Uang itu akan ditunda sampai masa sidang IV ini. Kemudian pada 18 mei 2011 lalu terdapat Raker dengan pemerintah membahas per-

merupakan simbol kenegaraan serta alat pembayaran yang sah.

Mengenai pencetakan Rupiah,lanjutnya perlu dijaga kerahasiaannya. Sementara percetakan dilakukan didalam negeri dan dilakukan oleh BI dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan. “Terdapat penambahan jumlah pasal dari awalnya 46 hingga sekarang menjadi 48 pasal, Sementara Bab tidak mengalami perubahan hanya redaksional agar isinya lebih representative,”terangnya. (si) foto:lw/parle

DPR Perlu Melakukan Reformasi Birokrasi



Anggota DPR saat mengikuti Sidang Paripurna DPR

Harapan rakyat Indonesia yang tinggi terhadap DPR RI, namun dihadapkan kepada kenyataan yang terjadi mengakibatkan timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR RI. Sehingga Ketua DPR RI Marzuki Alie mendorong segera dilakukan reformasi birokrasi terhadap Kesekjenan DPR RI.

“Reformasi birokrasi pada tubuh kesekjenan DPR RI diharapkan dapat lebih maksimal dalam memberikan supporting system kepada Dewan,” kata Marzuki Alie saat menjadi narasumber dalam dialog dengan BEM se Indonesia dengan tema “Memperkuat Kelembagaan DPR RI sebagai Pilar Demokrasi,” di IPB, Minggu (29/5), Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya DPR RI akan melakukan reformasi birokrasi dengan mengubah bentuk kesekjenan, yang akan menjadi terdiri dari Badan Fungsional Keahlian yang bekerja teknis mendukung kinerja Dewan dan bertang-

gungjawab langsung kepada Pimpinan DPR, Sekjen yang mengurus administrasi serta SDM, dan Badan Pengawas Internal.

Marzuki Alie menjelaskan setelah Reformasi dan Amendemen UUD 1945, DPR menjadi suatu lembaga yang Powerful yang diberikan kekuasaan oleh konstitusi untuk membuat Undang-Undang, mengatur anggaran dan melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, sehingga peningkatan kekuasaan ini harus disertai dengan membangun infrastruktur dan pendukung lembaga ini yang lebih baik.

Selain itu, tingginya intensitas ker-

ja dewan ditandai dengan banyaknya mitra kerja dan tingginya intensitas kerja ditingkat Alat Kelengkapan Dewan, maka diperlukan penambahan tenaga ahli menjadi 5 orang untuk tiap anggota. Karena menurutnya diharapkan tenaga ahli memberikan masukan secara rinci kepada anggotanya permasalahan yang terjadi di sektor pada bidang kerjanya.

Selanjutnya Marzuki alie dalam pertemuan tersebut juga memberikan semangat kepada mahasiswa untuk menekuni segala bidang studinya agar berhasil dalam dunia profesional, sehingga dapat dijadikan bekal dikala ingin mengembangkan diri dalam dunia politik. “manusia yang sukses adalah manusia yang disiplin, dan seorang pemimpin harus mempunyai pengalaman yang luas, wawasan, kearifan serta bijak, dan mempunyai wawasan ekonomi dalam membangun bangsa,”katanya. (as) foto:As

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Jampersal

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperhatikan Program Jaminan Persalinan (Jampersal).

Jampersal merupakan program pelayanan persalinan gratis, dikhawatirkan berbenturan dengan Program Keluarga Berencana BKKBN. Diperlukan sosialisasi agar semua masyarakat dapat terlayani terutama yang berada di daerah terpencil.

Hal tersebut mencuat saat Rapat Kerja Komisi IX yang dipimpin Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dengan Menteri Kesehatan Sri Endang Sedyaningsih dengan pokok bahasan Roadmap Kemenkes dalam mencapai Universal Health Coverage di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/5)

Dinajani H. Mahdi Anggota Komisi IX dari F-PD menyatakan apakah program jampersal ini ada pembatasan sampai persalinan beberapa, karena dikhawatirkan jika tidak ada pembatasan bisa saja seorang ibu mengandung sampai berkali-kali. "Jika tidak ada pembatasan dikhawatirkan berbenturan dengan program BKKBN gerakan dua anak cukup," terang Dina.

Teman satu fraksi Dina, Dian A. Syakhroza menyatakan program jampersal ini masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat terutama yang berada di pelosok-pelosok, sehingga diperlukan sosialisasi. "Saya mengharapkan Kementerian Kesehatan turun ke daerah-daerah bekerja sama dengan BKKBN demi tercapainya program ini," kata Dian.

Sedangkan Mardiana Indraswati Anggota Komisi IX dari F-PAN menyatakan program jampersal yang merupakan program unggulan Kemenkes, namun program tersebut



Menkes Sri Endang Sedyaningsih saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR membahas Jampersal

tidak diketahui oleh jajaran dibawah Kemenkes sendiri.

Diceritakan Mardiana ketika re-res, saat berkunjung ke Rumah Sakit Banyuasin tidak ada satupun petugas yang tahu tentang program jampersal, hanya pimpinan rumah sakit tersebut. "Sosialisasi demi terwujudnya program ini diperlukan bekerjasama dengan BKKBN," papar Mardiana.

Sementara Subagyo Partodiharjo dari F-PD menyatakan untuk meningkatkan jumlah pasien persalinan, maka system rujukan perlu ditingkatkan kembali.

Pemerintah Alokasikan Dana Rp 1.559 Trilyun bagi Jampersal

Dalam rapat kerja tersebut saat memberikan paparan Menkes menyatakan, pemerintah mengalokasikan dana Jampersal Rp 1,559 triliun pada 2012. Angka ini meningkat sekitar Rp 336 miliar dari anggaran 2011 lalu. Dengan program Jampersal ini, ibu hamil tidak perlu membayar biaya persalinannya baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Menteri Kesehatan Sri Endang

Sedyaningsih mengatakan bahwa tidak semua ibu hamil bisa menjadi penerima jaminan persalinan ini. Seperti jaminan kesehatan lainnya, Jampersal ini memiliki beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

"Salah satu syaratnya adalah, ibu hamilnya tinggal di desa maupun daerah tertinggal, kurang mampu, dan persalinannya normal," ungkap Endang.

Karena pelayanannya hanya untuk persalinan normal, lanjutnya, maka puskesmas yang jadi ujung tombak. Bila pasiennya tidak bisa ditangani karena keterbatasan alat, bisa dirujuk di rumah sakit umum daerah (RSUD).

"Sasaran kita pelayanan Jampersal di puskesmas maupun RSUD. Metode pelayanannya, seorang ibu hamil yang tidak mampu bisa langsung ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan tindakan dari dokter, yang bersangkutan tidak dikenakan biaya. Tenaga kesehatanlah yang mengklaim ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan uang pengganti Rp 350 ribu setiap pertindakan," jelasnya.

Dia berharap dengan Jampersal, angkat kematian ibu hamil dan bayi bisa ditekan. (sc) foto:lw

Taufik Kurniawan Minta Masyarakat Dieng Utamakan Keselamatan



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (nomer dua dari kiri) bersama Kepala PVMBG Surono (kanan)

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan hingga saat ini masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengutamakan keselamatan terkait dengan peningkatan, konsentrasi gas CO₂ di pegunungan Dieng terutama Kawah Timbang, di Jawa Tengah.

“Saya minta masyarakat tetap waspada dan tetap patuhi anjuran Pemerintah, dan para petugas, agar tidak terjadi korban dalam bencana ini. Karena keselamatan adalah paling utama, “tegasnya.

Taufik menceritakan informasi terakhir yang diperoleh dari Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Surono, hingga hari ini Senin (6/6) konsentrasi gas CO₂ mencapai 1,9%. Sebelumnya pada Minggu (5/6) volume mencapai 0,9% lalu meningkat menjadi 1,54%.

Karakter letusan Gunung Dieng, terutama di Kawah Timbang, menu-

rut Taufik sangat misterius yaitu tidak sama dengan gunung-gunung lainnya. “Kalau letusan gunung merapi, masyarakat bisa mendeteksi melalui wedhus gembel, tetapi letusan di gunung Dieng ini tidak disertai wedhus gembel tetapi berupa gas yang berbahaya, tidak berwarna dan tidak berbau tetapi mematikan, “terangnya.

Melihat kondisi tersebut, Taufik meminta masyarakat yang ada dalam radius satu kilometer untuk mengungsi sampai situasinya benar-benar aman. “Dari penjelasan ahlinya, kita ini sedang menghadapi musuh yang berbahaya karena tidak terlihat dan

tidak berbau. Semestinya ini menjadi kesadaran bersama sehingga petugas tidak perlu memaksa warga untuk mengungsi,” ujar dia.

Taufik menyadari, warga pegunungan Dieng, mendiami kawasan tersebut telah turun temurun. Sehingga sangat mungkin, ada perasaan berat meninggalkan tanah leluhurnya tersebut. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, untuk memberi kesadaran masyarakat, agar mengevakuasi diri ke tempat yang telah disediakan.

Sejauh yang ia amati, masyarakat sekitar pegunungan Dieng tampak sadar untuk dievakuasi ke tempat yang aman. Namun demikian, mengingat bencana ini belum dapat ditentukan sampai kapan berakhir, masyarakat diminta tetap sabar untuk berdiam di tempat pengungsian yang aman. Sampai saat ini radius aman yang ditetapkan hingga kemarin belum ada perubahan, yakni masih satu kilometer dari Kawah Timbang.

Mengenai pertemuannya dengan Kepala PVMBG Surono, Taufik menyatakan ada kekurangan terhadap sejumlah alat pencatat gempa atau Seismograf di dataran tinggi Dieng tersebut. Idealnya, setiap kawah yang terdapat di pegunungan Dieng tersebut memiliki seismograf, sehingga sumber gempa dapat terpantau dengan jelas.

Terkait dengan ini, Taufik menganjurkan pada kepala Daerah Wonosobo dan Kepala Daerah Banjarnegara segera mengajukan proposal pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kawasan Dieng itu kan sebagian ikut Banjarnegara dan sebagian ikut Wonosobo. Jadi, dua kabupaten itu silakan duduk bersama membuat kebutuhan-kebutuhan bersama terkait penanggulangan bahaya vulkanologi seperti seismograf atau

kebutuhan lain,” katanya.

Dengan mekanisme ini, pihaknya akan mendorong agar pengadaan alat tersebut dapat terwujud. “Kami, anggota DPR RI akan membantu sepenuhnya dan siap memperjuangkan secepatnya, alat pendeteksi gempa ini dapat segera terwujud, “ tegasnya.

Selain mengunjungi titik yang dekat dengan kawah gunung, Taufik juga mengunjungi tempat pengungsian penduduk. Sekitar 1200-an penduduk yang dievakuasi dalam bencana ini. “Dalam pantauan saya kemarin, yang banyak adalah anak-anak. Mereka beraktivitas seperti biasa. Tapi untuk anak SD yang memang akan melaksanakan ujian, mereka tengah belajar bersama. Saya juga sempat mendampingi mereka belajar, “ ujarnya.

Terkait dengan persediaan logistik, Taufik menuturkan, masih cukup memadai, bahkan untuk 4-5 hari ke depan. “Namun jika bencana ini telah melewati lebih dari 5 hari, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial dan BNPB juga telah siap untuk menyalurkan bantuan logistiknya, “ ungkapnyanya. [LSS]foto:doc parle



thebook.blogspot.com/infotrent

Dieng saat mengeluarkan gas beracun



Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan saat berada di tempat pengungsian bersama anak-anak korban letusan gunung dieng.

Komisi X DPR Upayakan Kekurangan Dana Sea Games 2011

Komisi X DPR RI akan mengupayakan kekurangan dana untuk pembangunan sarana Sea Games 2011 di Palembang. Demikian ungkap Ketua Tim Panja Sea Games Komisi X, Mahyuddin usai peninjauan pembangunan wisma atlet dan venues di Jakabaring Sport City (JBC), Jum'at (27/5).



Ketua Tim Panja Sea Games Komisi X DPR, Mahyuddin.



“Komisi X akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mengantisipasi masalah kekurangan dana pembangunan sarana Sea Games 2011. Komisi X juga akan mengusulkan dana tersebut dikeluarkan dari kas Kementerian Keuangan RI,” tuturnya.

Menurutnya, sejauh ini Komisi X tidak menargetkan berapa lama waktu untuk mengeluarkan dana tersebut dari Kementerian Keuangan. “Jika darurat kita gunakan dana darurat dari Kementerian Keuangan melalui Kepres, tergantung dari adendum kepres kepanitiaian dan tugas fungsinya. Intinya pelaksanaan Sea Games 2011 ini tidak akan terganggu,” jelasnya.

Namun sebelumnya, lanjut Mahyuddin, untuk menanggulangi kekurangan dana tersebut, Komisi X akan berkoordinasi dengan sejumlah pemangku jabatan terkait. Hal ini dilakukan mengingat pembangunan venues masih terdapat kendala dalam pendanaan, sehingga perlu dicari solusi yang ter-

baik agar kekurangan dana tersebut dapat diatasi, tambahnya.

“Hari Selasa (31/5) ini kita akan panggil Menteri Pemuda dan Olahraga, Inasoc Pusat dan juga kita panggil KOI atau KONI tentang berapa kekurangannya, karena saat ini kita juga belum tahu,” jelas Mahyuddin.

Sementara Ketua Inasoc, Rahmat Gobel mengatakan, masalah kekurangan dana yang diminta itu tidak masalah, karena dalam waktu dekat akan segera dicairkan. “Itu proses saja dan tunggu saja, sudah tidak lama lagi akan cair, dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Inasoc Daerah,” jelas Rahmat.

Sejauh ini pelaksanaan Sea Games 2011 tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Baik dalam konstruksi bangunannya maupun pematangan konsep selama Sea Games berlangsung, seperti persiapan hotel yang minta untuk dibayar di muka, tuturnya.

“Semua itu masalah proses,” kata Rahmat seraya menambahkan jangan semua masalah kecil diangkat menjadi

besar.

Di waktu yang sama Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto mengatakan, kekurangan dana tersebut tidak hanya untuk keperluan bangunan fisik atau sarana Sea Games 2011 saja, melainkan kebutuhan keseluruhan seperti prosesi pembukaan dan penutupan serta operasional lainnya.

“Jika kita tidak hanya memerlukan dana pembangunan saja, tetapi apapun kegiatan dalam Sea Games 2011 ini juga kita membutuhkan dananya,” kata Eddy. Hanya saja dana tersebut dapat segera dicairkan, mengingat banyaknya agenda yang harus dilaksanakan, tambahnya.

“yang jelas kita menunggu kepastian dulu, mudah-mudahan bulan depan sudah kita terima. Sehingga untuk biaya operasional selama persiapan menjelang Sea Games 2011 ini bisa ditangani, misalnya untuk melatih LO, penari dan lain-lainnya,” ujarnya. (iw)/foto:iw/parle.

Tokoh Agama Beri Masukan RUU Ormas

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang sejumlah tokoh-tokoh agama untuk dapat memberikan berbagai masukan terkait dengan Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Ida Fauziah (F-KB), Selasa (31/5) mengundang Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI).

Ida mengatakan, Perubahan RUU tentang Ormas ini masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2011. Masukan-masukan dari tokoh-tokoh agama ini tentunya sangat diperlukan untuk menyempurnakan draft RUU dimaksud.

Ditambahkannya, keberadaan organisasi kemasyarakatan sekarang seperti jamur di musim hujan. Sementara UU Ormas yang lama dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini.

Banyak kalangan mengatakan keberadaan Ormas belum dapat berperan aktif untuk meningkatkan keberadaan masyarakat, mengembangkan kehidupan yang demokratis dan harmoni, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan menjaga keutuhan sistem sosial kemasyarakatan.

Bahkan, katanya, ada ormas yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal inilah tentunya yang perlu diatur lebih lanjut dalam Perubahan Undang-undang ini.

Sebelumnya, Baleg DPR juga telah mengundang mantan Pimpinan Baleg yakni Bomer Pasaribu dan Pataniari Siahaan untuk mendapatkan sumbang pemikiran terkait dengan perubahan UU tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bantuan Hukum PB NU Andi Najmi



Wakil Ketua Baleg Ida Fauziah (F-KB) saat memimpin rapat membahas mengenai RUU Ormas



antardfoto.com/internet



persisi.net/internet

Ormas-ormas yang ada di Indonesia

mendukung sepenuhnya perubahan UU Ormas. Andi menyoroti syarat-syarat pendirian ormas harus diatur secara tegas, simple dan transparan.

Untuk Bab mengenai Hak dan Kewajiban, setiap ormas harus diberikan hak yang sama dan tidak diskriminatif. Sementara kewajiban setiap ormas

harus menjaga dan memelihara keutuhan NKRI.

Struktur organisasi setiap ormas menurut Andi harus ada di tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah.

Dia berharap, jika RUU ini sudah disahkan harus diimplementasikan dengan baik. "Sebaik apapun UU itu jika tidak diimplementasikan menjadi tidak bermanfaat," katanya.

Sementara Pengurus Pusat Muhammadiyah menegaskan, RUU ini harus diatur secara tegas hubungan ormas dengan partai politik. RUU ini juga perlu dimasukkan tentang etika, karena jika tidak dipagar dengan etika, dalam kenyataan ada ormas yang berbuat sewenang-wenang.

Tim Hukum dari Konferensi Wali Gereja Indonesia mengatakan, perubahan RUU ini harus jelas apa yang akan diatur. Apakah ormas di sini termasuk LSM, Yayasan atau Organisasi politik.

Kejelasan ini perlu karena jangan sampai UU Ormas ini tumpang tindih antara UU yang satu dengan yang lain. Apabila UU ini akan direvisi, sebaiknya dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.

Sementara Perwakilan dari PGI mengatakan, Pemerintah harus berlaku adil terhadap semua ormas. Independensi/kemandirian setiap ormas harus dijaga, ormas tidak boleh kepanjangan tangan dari Pemerintah/Partai Politik tertentu atau partai-partai

penguasa yang mengusung Pemerintah. Menurutnya, hal itu dikatakannya karena di masa lalu ada kecenderungan kuat hal seperti itu terjadi.

Dia juga mengatakan, dalam UU ini perlu ada ketegasan kewajiban negara untuk memperhatikan ormas. Dalam hal ini, ormas berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Terkait pasal yang menyebutkan Pemerintah bisa membekukan ormas jika terjadi pelanggaran, dalam hal ini dia berpendapat apakah tepat pembekuan itu dilakukan Pemerintah. Menurutnya, jika ormas melakukan pelanggaran sebaiknya dilakukan melalui proses pengadilan. (tt) foto:Ry/parle

Pengambilan Keputusan RUU MK Ditunda

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI rencananya akan melanjutkan rapat kerja minggu depan setelah agenda Pengambilan Keputusan RUU Mahkamah Konstitusi (MK) batal diputuskan karena masih ada beberapa pasal krusial yang belum disepakati.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono dihadiri Menteri Hukum dan HAM dan Perwakilan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara rencananya (Senin 30/5) mengagendakan Pengambilan Keputusan RUU tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya akan dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Dalam laporannya, Ketua Panja RUU MK Dimiyati Natakusumah mengatakan, rapat Panja tanggal 23 November 2010, 31 Januari 2011, 7 dan 8 Februari 2011 berhasil menyelesaikan/menyetujui beberapa permasalahan yang sebelumnya terpendung pembahasannya.

Adapun permasalahan yang telah disepakati dalam Panja tersebut adalah masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi disepakati menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, pendidikan hakim konstitusi disepakati berpendidikan linear, yaitu Strata 1 (Sarjana), Strata 2 (Magister) dan S3 (Doktor) di bidang ilmu hukum.

Selain itu hal lain yang telah disepakati adalah syarat minimal dan maksimal usia pengangkatan hakim konstitusi adalah 50 (lima puluh) ta-



Ketua Baleg Ignatius Mulyono (tengah) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM.

hun dan 60 (enam puluh) tahun. Penyelesaian perselisihan/sengketa kepala dan wakil kepala daerah disepakati untuk dikembalikan ke Mahkamah Agung, sehingga tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disepakati terdiri dari lima orang anggota, yaitu terdiri dari satu hakim konstitusi, satu unsur dari Komisioner Komisi Yudisial, satu unsur dari DPR yang menangani legislasi, satu unsur dari Pemerintah cq Kemenkumham dan satu unsur dari Mahkamah Agung.

Dengan demikian, kata Dimiyati, masih terdapat dua permasalahan yang belum disetujui/disepakati oleh Panja bersama Pemerintah, yaitu permasalahan yang terkait dengan mekanisme penggantian hakim konstitusi dan usia pensiun hakim konstitusi.

Terhadap dua permasalahan tersebut, selanjutnya dibahas dalam rapat

Panja pada tanggal 18 Mei 2011 yang akhirnya berhasil menyepakati bahwa usia pensiun hakim konstitusi menjadi 65 tahun.

Sementara mekanisme penggantian hakim konstitusi yang menggantikan hakim yang diberhentikan/digantikan adalah melanjutkan sisa masa jabatan.

Dimiyati menambahkan, setelah melalui pembahasan yang cukup mendalam, ke tujuh permasalahan yang krusial dari RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dapat diselesaikan.

Namun setelah dilakukan sinkronisasi antar materi muatan RUU ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menyempurnakan hasil pembahasan RUU tersebut diantaranya adalah bunyi Pasal 18 ayat (1a) yang menyebutkan bahwa “calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahka-

mah Agung adalah hakim agung”. Diusulkan untuk dihapus untuk memberi keleluasaan Mahkamah Agung dalam mengajukan calon hakim konstitusi.

Pasal 23 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan “hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 65 tahun”. Ketentuan ini tentunya akan membelenggu/mempersempit keleluasaan Mahkamah Agung mengajukan calon hakim konstitusi, karena hakim agung pensiun setelah berusia 70 tahun (ada selisih 5 tahun). Diusulkan kembali sesuai ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003, yaitu 67 tahun.

Terkait perubahan Pasal 23 ayat (1) huruf c, tentunya akan berpengaruh terhadap batasan usia calon hakim konstitusi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dimana ditentukan paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 60 tahun, Diusulkan menjadi paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun. (tt)foto:Ry

Baleg Undang Bomer dan Pataniari Terkait Revisi UU Keuangan Negara

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah, Kamis (26/5) ingin menggali lebih jauh pemikiran-pemikiran dari para senior Badan Legislasi yang sudah berpengalaman di bidang legislasi.

Dimiyati mengatakan, perubahan UU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2011.

Menurut Dimiyati, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 belum mengatur mengenai kemandirian pengelolaan keuangan negara bagi pemegang kekuasaan pemerintahan, pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang dan pemegang kekuasaan kehakiman. Untuk itu, undang-undang ini perlu dilakukan perubahan.

Bomer Pasaribu yang pada periode lalu sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi mengatakan, upaya merevisi UU No. 17/2003, telah lahir 6 tahun yang lalu sejak adanya penugasan Pimpi-

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang dua mantan Pimpinan Baleg Bomer Pasaribu dan Pataniari Siahaan untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan Perubahan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah

nan DPR dan Bamus (periode 2004-2009) tanggal 9 Maret 2005 kepada Baleg dan Komisi XI untuk melakukan kajian dan analisis peraturan perundangan guna optimalisasi otonomi, ke-
mandirian dan efektifitas fungsi DPR.

Menurut Bommer, seiring berkembangnya dinamika, tuntutan bukan hanya optimalisasi peran DPR saja tetapi juga lembaga negara lain seperti DPD, Komisi Yudisial yang sangat berdekatan dengan tiga puncak kekuasaan negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Perubahan UU ini bertujuan meng-optimalisasi kelembagaan tiga puncak kekuasaan negara disertai lembaga padanannya yang perlu mendapatkan prioritas termasuk DPD dan Komisi Yudisial (KY).

Menurut dia, Baleg perlu menyamakan visi dan persepsi dari peruba-

han UU ini, apakah yang diinginkan Baleg perubahan total atau limitatif.

Namun Bommer menyarankan prinsip revisi UU ini sebaiknya limitatif (terbatas). Karena kalau perubahannya bersifat menyeluruh akan memerlukan waktu yang sangat panjang. "Kita fokus pada tiga puncak kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan padanannya," katanya.

Revisi dilakukan secara limitatif pada prinsipnya lebih praktis/cepat dan final dalam tahun 2011 ini, sehingga dapat terimplementasikan pada APBN 2012 dan seterusnya. Prinsip revisi limitatif dimaksudkan juga untuk mengantisipasi perubahan terhadap UU lain yang terkait, misalnya UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Kuangan Negara serta Undang-undang lainnya.

Sedang perubahan substansi dari UU ini menurut Bommer terutama penambahan 2 Bab yaitu Bab II A Kekuasaan pengelolaan keuangan negara pada DPR dan DPD dan Bab II B Kekuasaan pengelolaan keuangan negara pada kekuasaan Kehakiman (MA, MK dan KY).

Sementara Pataniari Siahaan yang juga mantan Wakil Ketua Baleg periode 2004-2009 mengatakan, sepakat UU Keuangan Negara ini dilakukan perubahan.

Namun menurut Pataniari, Baleg harus melakukan kajian secara mendalam terhadap perubahan UU tersebut. Mengingat ada 18 UU lainnya yang terkait erat dengan UU tersebut, perlu sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan. (tt) foto:Ry/parle

Ormas Kedaerahan Jadi Topik Hangat Pembahasan Perubahan UU Ormas

Beberapa anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI banyak menyoroti Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kedaerahan yang semakin menjamur keberadaannya.

Anggota Baleg Rahadi Zakaria mengatakan, banyak kalangan berpandangan menjamurnya ormas-ormas kedaerahan merupakan langkah kemunduran yang sangat luar biasa.

Rapat dengar pendapat umum pagi itu, Senin (30/5) mengundang Pakar Ilmu Politik Burhan D. Magenda dan Zaenal Abidin Bagir, dalam rangka mencari masukan-masukan terkait dengan pembahasan perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub, Rahadi menambahkan dimasa kemerdekaan dulu, ormas-ormas kedaerahan seperti Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Sumatera melebur menjadi satu mengikrarkan menjadi satu pemuda dalam Kongres Pemuda I. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda ke dua yang disebut dengan Sumpah Pemuda.

"Munculnya ormas kedaerahan itu adalah suatu fenomena kemunduran disebut negara," kata Rahadi. Kenyataan diberbagai negara tidak ada ormas kedaerahan, tapi yang ada



Anggota Baleg Eddy Mihati saat memberikan pandangan mengenai menjamurnya ormas kedaerahan



Ormas-ormas kedaerahan yang menjamur di Indonesia

adalah ormas-ormas yang sifatnya nasional.

Sementara anggota Baleg dari F-PDI Perjuangan Eddy Mihatni menyoroti dimungkinkannya keterlibatan organisasi masyarakat asing melakukan kegiatan di Indonesia.

Eddy meminta masukan dari nara sumber bagaimana pengaturan yang ideal bagi relasi keduanya meskipun sudah ada klausul-klausul yang termuat di dalam rancangan UU ini. Dia mengkhawatirkan keterlibatan ormas asing tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu instrumen asing untuk dapat mengintervensi dan masuk terlalu intens dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Ini kan membahayakan bangsa dan negara, indikasi itu bisa kita tangkap selama ini," kata Edi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Burhan Magenda mengatakan, pada prinsipnya keberadaan ormas terbuka apakah ormas keagamaan, ormas politik atau ormas-ormas lainnya.

Terhadap Ormas kedaerahan, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip negara kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, tidak perlu dimusuhi atau pun dilarang. "Jadi boleh tapi mungkin ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ke-

beradaan ormas kedaerahan ini," katanya.

Kecuali, ormas kedaerahan kalau ditujukan untuk kepentingan politik itu menjadi ethnic mobilization. "Itu baru berbahaya bisa menjurus kepada konflik-konflik dengan etnik yang lain," tambahnya.

Tapi kalau untuk kepentingan sosial, pemberdayaan ekonomi sah-sah saja, tapi diperhalus tidak perlu daerahnya, tapi cukup provinsi atau kabupaten saja. Kalau secara eksplisit menyebut etnik, ini yang agak berbahaya. Dalam satu daerah tidak selalu hanya satu etnik, bisa bermacam-macam, jadi tidak bertentangan dengan semangat sumpah pemuda.

Sementara menanggapi keterlibatan ormas asing, Burhan mengatakan keterlibatan organisasi masyarakat asing tidak bisa dilarang. Ketentuan dalam Pasal 33 dan 34 UU ini menurutnya sudah baik, bahwa dana-dana asing disetujui oleh pemerintah atau diketahui oleh pemerintah, jadi pelaksanaannya legal.

Sementara Zaenal Abidin Bagir menambahkan, yang perlu digarisbawahi semangat untuk merevisi UU ini terutama untuk menjaga ruang kebebasan yang kita miliki saat ini dan belakangan ruang kebebasan ini dimanfaatkan

oleh organisasi-organisasi, individu-individu yang tidak seperti yang kita inginkan.

Dalam hal ini, ada kekerasan, muncul ormas-ormas baru yang anarkis radikal, dan inilah yang perlu diatasi. Zaenal mengingatkan, jangan sampai karena berpikir ada ormas-ormas yang sifatnya radikal terus kita menebar jaring yang terlalu besar sehingga kita ingin membatasi tetapi pembatasannya kena kemana-mana.

Soal ormas kedaerahan, dia berpendapat dengan Burhan, keberadaan ormas kedaerahan sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. "Suka atau tidak suka inilah konsekwensi dari demokratisasi, konsekwensi dari ruang kebebasan yang sudah ada, kita mungkin masih harus belajar bagaimana menghendel ini tetapi ini fakta yang sudah ada," imbuhnya.

Menurutnya, ruang kebebasan ini harus dijaga dan salah satu instrumennya hukum, dan instrumen yang lain civic culture.

Untuk bantuan asing yang masuk menurutnya memang perlu dilakukan audit. Untuk itu dia mengusulkan perlu dimasukkan dalam salah satu pasal sanksi kalau bantuan asing itu tidak diberitahukan pemerintah. (tt) foto: Ry/parle

Langkah Maju Bagi Keamanan Kawasan Asia Tenggara

Akhir-akhir ini masyarakat internasional masih harus menyaksikan sejumlah konflik bersenjata yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menelan korban nyawa yang tidak sedikit. Berbagai konflik dapat seketika terjadi dengan beragam faktor pemicu, baik bersumber pada persoalan internal suatu negara, ataupun persoalan antarnegara, seperti sengketa perbatasan yang biasanya berkaitan dengan perebutan sumberdaya alam.



Oleh: DR. H. Marzuki Alie

cara damai dan mengedepankan tindakan-tindakan multilateral. Memaksimalkan mekanisme dialog yang telah dibangun untuk menyelesaikan berbagai perbedaan di dalam negeri, maupun antarnegara, merupakan langkah yang bijaksana daripada penggunaan ancaman kekuatan militer.

Negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN selama ini dianggap telah berhasil meredam dan mencegah berbagai sengketa menjadi konflik bersenjata diantara mereka. Prinsip-prinsip yang dipegang ASEAN, seperti prinsip untuk tidak mencampuri persoalan dalam negeri negara lain, merupakan salah satu fak-

sengketa perbatasan. Terdapat beberapa wilayah sengketa yang memiliki potensi mengarahkan pada konflik militer, bahkan telah ada yang memicu kontak bersenjata meskipun masih pada skala rendah. Sengketa teritorial yang dimaksud misalnya: sengketa antara Vietnam dan China atas Kepulauan Paracel, sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, ataupun sengketa yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN, yaitu Brunei, Malaysia, Philipina, Vietnam, dengan China dan Taiwan atas penguasaan Kepulauan Spratly. Persoalan di Laut Cina Selatan masih menjadi perhatian utama negara-negara Asia Tenggara.

Sekalipun negara-negara Asia Tenggara telah tergabung dalam organisasi negara-negara kawasan yang cukup mapan, kawasan ini **tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik di tingkat regional** yang tegas dalam penyelesaian berbagai perbedaan di antara mereka. Sejumlah kerjasama multilateral telah ada dan lahir di kawasan Asia Tenggara, tetapi dalam prakteknya kerjasama tersebut masih tersendat-sendat akibat keengganan dari masing-masing anggotanya untuk mempererat multilateralisme. Masih adanya rasa saling curiga-mencurigai, masih lebih dipercayainya bilateralisme sebagai mekanisme yang lebih menguntungkan, dan keengganan untuk saling membuka diri di antara negara-negara kawasan, merupakan faktor-faktor yang menghambat kerjasama untuk menjamin stabilitas keamanan kawasan. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka di masa mendatang setiap negara akan dipaksa untuk selalu mewaspadaai segala dinamika di kawasan. Ancaman eksternal dapat terjadi kapan saja, dalam bentuk



Anggota Baleg Rahadi Zakaria saat memberikan pandangan mengenai menjamurnya ormas kedaerahan

Dalam kondisi yang demikian, masyarakat internasional, termasuk masyarakat kawasan Asia Tenggara, harus tetap berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan di antara mereka dengan mengutamakan cara-

tor yang mampu menjaga hubungan antar-negara ASEAN tetap harmonis. Akan tetapi, perlu diwaspadai bahwa di antara negara-negara anggota ASEAN masih menyimpan sejumlah potensi konflik yang berkaitan dengan

konflik teritorial yang menjurus pada konfrontasi militer, atau dalam bentuk yang ekstrim, konflik teritorial berkembang menjadi perang terbatas.

Suatu perkembangan positif yang tercapai melalui Pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN/ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) ke-5 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu perlu mendapatkan apresiasi. Pertemuan tersebut berhasil menyepakati lima bidang fokus kerjasama yang perlu ditingkatkan sesuai dengan pola dan tantangan regional dan global, yang akan dihadapi di masa mendatang. Kelima fokus kerjasama tersebut mencakup: [1] keamanan maritim, [2] operasi penjaga perdamaian, [3] peningkatan industri pertahanan, [4] penanggulangan bencana dan [5] bantuan kemanusiaan, dan program kerja tiga tahunan Menhan se-ASEAN. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kerjasama itu, dihasilkan pula dua inisiatif penting, yaitu pembentukan *the ASEAN Peacekeeping Centres Network* dan *the ASEAN Defence Industry Collaboration*. *The ASEAN Peacekeeping Centres Network* akan memfasilitasi kerjasama dalam operasi penjaga perdamaian di antara negara anggota ASEAN melalui perencanaan, pelatihan dan pertukaran pengalaman.

Sementara, *the ASEAN Defence Industry Collaboration* akan memberikan kesempatan untuk terjadinya kerjasama perdagangan intra-ASEAN untuk produk-produk dan jasa pertahanan yang berlandaskan pada prinsip fleksibilitas, sukarela, dan partisipasi yang tidak mengikat.

Dalam rangka mempersiapkan kerjasama pertahanan ASEAN yang lebih baik di masa depan, ADMM juga menyepakati program kerja tiga tahunan yang baru untuk periode 2011-2013. Program Kerja tersebut akan menjadi pedoman ADMM dalam mengimplementasikan kerjasama yang berkaitan dengan isu-isu seperti bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana serta operasi penjaga perdamaian. Terlaksananya Program Kerja tersebut akan tergantung pada *capacity-building*, pelatihan dan interaksi praktis lainnya antarmiliter negara-negara anggota ASEAN.

Setelah lima tahun berdiri sejak

2006, ADMM telah meningkatkan rasa saling percaya di antara masing-masing negara sehingga memungkinkan terjadinya pembicaraan mengenai isu-isu yang sebelumnya dianggap

Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan yang dicapai melalui ADMM, bersama dengan peningkatan kerjasama ASEAN dengan delapan mitra wicara lainnya melalui ADMM-plus,



sensitif. Pada pertemuan ADMM ke-5, misalnya, perwakilan negara-negara anggota ASEAN menyampaikan kesamaan sikap mereka untuk mendorong penggunaan cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Bahkan Indonesia menunjukkan perannya sebagai ketua ASEAN dengan membawa kedua negara dalam suatu pertemuan disela agenda acara ADMM.

Tercapainya sejumlah kesepakatan melalui ADMM ke-5 merupakan wujud penegasan kembali oleh ASEAN atas komitmennya untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan kawasan serta kepentingan internal ASEAN sekaligus merespon tantangan komunitas global. ASEAN tidak dapat terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional maupun global yang memunculkan berbagai tantangan serta memberikan beragam peluang. Berbagai persoalan keamanan non-tradisional yang juga harus dihadapi negara-negara ASEAN, seperti terorisme, perompakan, imigran gelap, keamanan maritim, perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan air, kelangkaan sumberdaya alam, mempertegas semakin pentingnya kerjasama di sektor pertahanan dan keamanan di masa mendatang.

merupakan bagian dari langkah maju menuju Komunitas ASEAN 2015. Indonesia yang saat ini memegang keketuaan ASEAN harus dapat mengelola perkembangan positif ini, sehingga kontribusi Indonesia sebagai ketua ASEAN menjadi bagian dari catatan sejarah dalam mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang stabil dan aman. Penting pula bagi DPR-RI untuk memberikan dukungan, pengawasan, serta dorongan kepada pemerintah RI untuk memanfaatkan berbagai mekanisme multilateral yang dimiliki ASEAN demi mewujudkan keamanan kawasan Asia Tenggara. Salah satu resolusi tentang situasi keamanan global dan regional yang diadopsi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada September 2010 lalu, juga mengamanatkan parlemen negara-negara anggotanya untuk melakukan hal tersebut. Perkembangan-perkembangan yang tercapai pada ADMM ke-5 merupakan hal yang sangat positif dalam rangka **membangun arsitektur keamanan regional yang sehat dan dinamis**. Tercapainya stabilitas keamanan kawasan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan politik global.** (parle)

DPR Prediksi Perekonomian Tahun 2012 Membaik

Kalangan DPR Optimis Perekonomian Indonesia pada 2012 semakin membaik karena itu pemerintah diharapkan memberikan proyeksi ekonomi makro yang lebih tinggi mengingat semakin kondusifnya perekonomian dunia saat ini. Selain itu, Pemerintah diminta memfokuskan program ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong sector real di Indonesia.



Hikmat Tomet, anggota DPR dari Fraksi Golkar

Anggota DPR dari Partai Golkar Hikmat tomet (PG) memberikan catatan terhadap proyeksi pemerintah terkait makro ekonomi 2012 mendatang, dia mengusulkan target pertumbuhan sebesar 6.5-6.9 persen ditingkatkan mengingat pertumbuhan ekonomi dunia semakin kondusif.

“Target angka pertumbuhan 6.5-6.9 persen masih rendah mengingat semakin kondusifnya perekonomian dunia dimana seharusnya menargetkan

angka pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan 2010 lalu,”terangnya saat membacakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2012, di Sidang Paripurna, Rabu, (25/5)

Menurutnya, lembaga Ekonomi dunia telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi bahkan BPS memprediksi mencapai 6.5 persen. “Seharusnya Pemerintah menargetkan minimal 7 persen dengna mendorong industry padat

karya dan manufaktur guna mendorong perekonomian yang lebih berbobot,”jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus sinergikan dan mendorong interkoneksi antar kawasan didaerah. Khusus mengenai nilai tukar valuta asing, sebesar Rp. 9000 rupiah per dolar US diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia namun yang harus diwaspadai masuknya hot-money dana asing ke Indonesia dimana akan terus berlanjut sampai tahun 2012 mendatang.

Untuk suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6.5-7 persen, Partai Golkar mendesak suku bunga diturunkan dibawah 6 persen agar investasi sector dapat berkembang. Mengenai lifting minyak sebesar 950-970 ribu per barel, Paratai Golkar mendesak pemerintah untuk mengejar target lifting minyak tersebut mengingat masih rendahnya lifting minyak saat ini sebesar 872 ribu barel perhari.

“Pada tahun 2012 pemerintah harus mampu berikan angka yang lebih kredibel terkait dengan harga lifting minyak. Sementara defisit yang diusulkan pemerintah sebesar 1.4 -1.6 persen dari PDB seharusnya menargetkan defisit 2 persen dimana anggaran tersebut dapat berimplikasi terhadap penambahan untuk infrastruktur,”jelasnya.

Memburuknya infrastruktur di Indonesia memberikan multifier efek kedepannya karena itu perlu dipikirkan bagaimana memfokuskan kepada sektor infrastruktur. Selain itu, pemerintah harus mendorong kebijakan